



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Gedongkuning 146 Yogyakarta 55171
Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432
Website jogja.kemenkumham.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan triwulanan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan kinerja yang telah berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja).

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta di masa yang akandatang.

2. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian perjanjian kinerja triwulan II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta bertujuan untuk menilai tingkat capaian tujuan/program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun anggaran 2022. Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya selama tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja triwulan II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dilaksanakan pada periode Triwulan II

Tahun 2022.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH.1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian perjanjian kinerja pada triwulan II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal dengan melibatkan para pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja dari rencana kinerja tahunan yang telah disusun untuk triwulan II Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tersebut memuat perkembangan progress/kemajuan dan kendala/permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana tugas masing-masing program dan kegiatan.

Diharapkan melalui hasil evaluasi atas capaian perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Triwulan II ini selain sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja juga sekaligus dapat dijadikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan upaya strategis serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam mencapai target kinerja di periode bulan berikutnya.

C. HASIL YANG DICAPAI

Rencana Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Berdasarkan hasil pencapaian per Triwulan II Tahun 2022, realisasi capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,92	Hasil diperoleh dari survey 3AS Balitbangku mham

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	52%	Tercapai di Triwulan 4
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	85%	Laporan masuk 7, (5 Selesai, 1 dicabut dan 1 dalam proses).
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	631 Layanan	3.952 Permohonan	
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	10 Lokus	Diseminasi di D.I. Yogyakarta
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	4 kasus sudah selesai di mediasi jan-april
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	Westlake dan Polda DIY
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan	3 Laporan	2 Laporan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Intelektual di Wilayah			
5.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	50%	Berupa Rekomendasi Intervensi hasil Survei IPK-IKM dan Rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	2 Buku	1 Buku kegiatan OPini 1 Buku Jurnal Hukum dan HAM
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	40 %	Tw I : Harmon sebanyak 16 raperda, medkon 54 raoerda , 3 raoergub dan 2 raperwal. Penyusunan Naskah akademik sebanyak 9 raperda. TW II : Harmon sebanyak 18 raperda, medkon sebanyak 73 raperda, 4 rapergub dan 8 raperwal, penyusunan NA sebanyak 9 raperda.
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang	25 Orang	27 orang	Telah dilakukan kegiatan Bimtek

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	perundang-undangan	peraturan perundang-undangan			pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dan kegiatan pola karir perancang perundang-undangan dilaksanakan pada triwulan II
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	-	Telah dilakukan persiapan kegiatan Analisa Evaluasi Hukum, serta fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	46%	Kegiatan pemberian bantuan hukum litigasi dimulai pada bulan Maret. Hingga bulan Juni terdapat 228 permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang telah dicairkan.
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	47%	Kegiatan pemberian bantuan hukum non litigasi dimulai pada bulan April. Hingga bulan Juni terdapat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					46 kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi yang telah dicairkan.
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	85.55%	Kepuasan layanan bantuan hukum sebesar 85.55% diambil dari rekap data Survei Layanan Bantuan Hukum ikmprakomlab.com
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	0%	Status pembentukan DSH/KSH dalam tahapan pembinaan oleh penyuluh hukum dan OBH. Penilaian akan dilakukan pada triwulan 4.
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	Anggota JDIHN aktif telah tergabung dengan portal/sistem integrasi JDIHN. Pada tahap ini tetap dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja para anggota.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah (BAPPEDA DIY, BAPPEDA Kab. Sleman, BAPPEDA Kab. Gunung Kidul, BAPPEDA Kab. Kulon Progo, BAPPEDA Kab. Bantul, BAPPEDA Kota Yogyakarta)	Pemenuhan terhadap perlindungan hak perempuan, anak dan kaum disabilitas oleh pemerintah daerah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah (Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta)	Telah dilakukan pengumpulan data dukung Kab/Kota Peduli HAM se-DIY yang kemudian diupload di aplikasi kkpham.kemenumham.go.id
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	16 UPT	Rapat Persiapan Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah yang diikuti oleh 16 UPT di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Sudah adanya tindak lanjut terhadap permasalahan dugaan pelanggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					HAM (sudah menghasilkan rekomendasi)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81%	97%	Melebihi Target
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	100%	Melebihi Target
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100%	Melebihi Target
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	100%	Melebihi Target
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	75,8%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik dengan predikat Memuaskan pada Instrumen Kepribadian sebanyak : 991 Narapidana ➤ Jumlah Narapidana per 31 Maret 2022 sebanyak : 1.307 Narapidana ➤ Persentase narapidana yang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian : 991/1.307x 100% : 75.8% (Melebihi Target)
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Target Narapidana yang mendapatkan hak Remisi bulan Jan-Maret sebanyak : 1 Narapidana ➤ Realisasi Narapidana yang mendapatkan hak Remisi bulan Januari s.d Maret sebanyak : 1 Narapidana ➤ Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi : $1/1 \times 100\% = 100\%$ (Melebihi Target)
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	47%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Target Integrasi dalam 1 Tahun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					sebanyak : 639 narapidana ➤ Realisasi Integrasi bulan Januari s.d Maret 2022 sebanyak : 302 Narapidana ➤ Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi : $302/639 \times 100\% = 47\%$
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	Melebihi Target
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	20%	Melebihi Target
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	29,1%	= Jumlah WBP bersertifikat / jumlah dalam pagu(DIPA) x 100% $= 105/360 \times 100\% = 29,1\%$ Melebihi Target
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	71,5%	= Jumlah rekap form 28A / jumlah Narapidana saat ini x 100% $= 836/1168 \times 100\%$

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					=71,5% Melebihi Target
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100%	Melebihi Target
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	100%	Melebihi Target
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	75%	Melebihi Target
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	85%	Melebihi Target
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	70%	Melebihi Target
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100%	Melebihi Target
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	Melebihi Target
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	100%	Melebihi Target
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	100%	Melebihi Target

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	Melebihi Target
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	Melebihi Target
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	100%	Melebihi Target
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	Melebihi Target
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	Melebihi Target
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	Melebihi Target
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	Melebihi Target
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	Melebihi Target

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,87	Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja (IKM, IKI, IPK) Triwulan I Tahun 2022

					dari Dirjend Imigrasi
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	3,96	Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja (IKM, IKI, IPK) Triwulan I Tahun 2022 dari Dirjend Imigrasi
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,89	Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja (IKM, IKI, IPK) Triwulan I Tahun 2022 dari Dirjend Imigrasi

Berdasarkan monitoring dan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Triwulan II Tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yang perlu dilaksanakan pada periode triwulan selanjutnya, antara lain sebagaimana berikut:

No.	Uraian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2022	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Meningkatkan Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah oleh Kantor Wilayah dengan pemenuhan target yang dilaksanakan pada triwulan kedua	Belum Tuntas
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Hasil Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secepatnya pada triwulan kedua	Belum Tuntas
3.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dapat diketahui pada akhir triwulan tahun anggaran 2022	Belum Tuntas

4.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dapat diketahui pada akhir triwulan tahun anggaran 2022	Belum Tuntas
----	--	---	--------------

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2022 baik kegiatan yang telah terlaksana atau yang belum terlaksana sedikit terdampak oleh pandemi Covid-19 yang kembali naik di wilayah D.I. Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta, dimana sejak diberlakukannya PPKM level 3 di wilayah Kota Yogyakarta pada awal bulan maret tahun 2022 berdampak terhadap pelaksanaan capaian kinerja kantor wilayah dengan diterapkannya sistem WFO dan WFH. Meskipun ditengah kondisi yang tidak menentu dikarenakan wabah covid-19, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dan jajarannya tetap berkomitmen untuk mencapai sasaran dan target kinerjanya dan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna layanan, masyarakat.

Adanya kebijakan Auto Adjustment (AA) dalam rangka pencadangan belanja Pemerintah Pusat yang berasal dari sebagian belanja Kementerian/Lembaga yang diblokir sementara, sehingga beberapa kegiatan belum dapat terlaksana atau masih menunggu pembukaan blokir anggaran.

Secara umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja triwulan II Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tidak terdapat permasalahan berarti yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Kinerja yang dilaksanakan telah mencapai target yang disusun sebelumnya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dikarenakan masih mewabahnya Covid-19 dan ditetapkannya kebijakan PPKM di wilayah kota Yogyakarta maka diharapkan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan tatap muka secara langsung dialihkan sebagian secara virtual;
 2. Percepatan realisasi anggaran harus terus ditingkatkan sehingga target realisasi anggaran tercapai dengan maksimal pada tahun berikutnya;
 3. Perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Instansi eksternal/terkait lainnya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, agar kegiatan selanjutnya dapat lebih terprogram dan berjalan sesuai yang diharapkan;
- Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta pada Triwulan selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan mengacu target yang terdapat pada

perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi mandiri atas capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Triwulan II Tahun 2022. Diharapkan kami dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang telah ditetapkan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Imam Jauhari
NIP 196308231992031001